

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan sempurna dibandingkan pada makhluk lainnya. Namun demikian, manusia tidak harus terjebak dalam konsep kesempurnaan semata, sebab dalam hakikatnya pada masing-masing individu mempunyai keterbatasan masing-masing. Tidak sedikit orang yang memandang keterbatasan ini sebagai keadaan yang kurang wajar, dan individu yang mengalami keadaan tersebut disebut sebagai penyandang disabilitas atau juga sebagai orang dengan kebutuhan khusus. Secara umum, masyarakat memahami penyandang disabilitas ini sebagai individu yang mempunyai keterbatasan pada aspek fisik maupun mental yang akibatnya memunculkan hambatan dalam pencapaian prestasi. Sebagai bagian dari kelompok penyandang disabilitas, menurut Raintung et al (2024) anak-anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan memerlukan perhatian khusus, sebab mereka masih rentan mengalami diskriminasi dalam berbagai interaksi sosial.

Sejak lahir, setiap individu termasuk dalam bagian masyarakat yang memiliki hak-hak dasar yang sifatnya universal, wajib dihormati, dan dilindungi keberadaannya. Hak tersebut berlaku pada setiap diri manusia tanpa pengecualian, termasuk juga dengan para penyandang disabilitas. Sebagai warga negara Indonesia, hak-hak tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Undang-undang tersebut, negara memastikan bahwa penyandang distabilitas terbebas dari diskriminasi, kekerasan, dan tindakan yang sewenang-wenang. Tidak hanya itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (2016) juga mengontrol mengenai hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan sosial sebagai bentuk mendukung kemandirian dan perlindungan dalam keadaan darurat.

Namun pada realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah stigma negatif terhadap penyandang disabilitas masih menjadi persoalan sosial yang serius di masyarakat Indonesia. Sering kali keberadaan disabilitas disamakan dengan kondisi pada orang sakit yang tidak berdaya yang menyebabkan

perlakuan orang terhadap penyandang disabilitas ini hanya untuk dikasihani dan diasuh demi keberlangsungan hidup mereka. Hal tersebut sering kali menyebabkan pandangan bahwa pendidikan bukanlah prioritas utama bagi penyandang disabilitas, sehingga peluang mereka untuk berkembang secara mandiri menjadi terbatas. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan yang terlihat jelas antara jaminan hukum yang telah dibentuk oleh negara terhadap realitas sosial yang dirasakan langsung oleh para anak penyandang disabilitas Pramana (2018).

Dengan itu, pemberdayaan melalui rehabilitasi sosial bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban negara terhadap hak penyandang disabilitas, namun juga sebagai langkah nyata dalam membangun sistem sosial yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Peristiwa ini sejalan terhadap tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs), terkhusus pada tujuan ke-4 mengenai pendidikan berkualitas dan tujuan ke-10 mengenai pengurangan ketimpangan, yang penekanannya terhadap kepentingan dalam akses pendidikan dan perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk terhadap anak penyandang disabilitas Bappenas, (2025).

Salah satu bentuk upaya tersebut tercermin melalui program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Sekolah Luar Biasa (SLB), menurut Dinas Sosial (2019), yaitu lembaga pendidikan formal yang dirancang secara khusus untuk melayani anak-anak yang mempunyai hambatan seperti mental, fisik, emosional, atau sosial Keberadaan SLB ini sangat penting dikarenakan pendekatan pembelajaran yang digunakan telah dirancang dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan khusus para peserta didik, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka secara optimal. Program rehabilitasi sosial ini bukan hanya bertujuan sebagai pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga sebagai membangun keterampilan dasar, pemulihan psikososial, dan kemandirian anak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan data terbaru DaftarSekolah.net, (2025) terdapat 80 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta SLB tersebut berada di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten

Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, yang terdiri atas SLB negeri maupun swasta. Dari total tersebut, SLB negeri berjumlah 9 sekolah, dengan rincian 3 SLB di Kota Yogyakarta, terdapat 2 SLB di Kabupaten Gunung Kidul, 2 SLB di Kabupaten Bantul, 1 SLB di Kabupaten Kulon Progo, dan 1 SLB di Kabupaten Sleman. Adapun SLB swasta berjumlah 70 SLB. Dari keseluruhan SLB di DIY, baru 14 SLB yang memperoleh akreditasi A, 12 SLB terakreditasi B, dan sisanya belum terakreditasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar SLB masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar mutu pendidikan yang ideal.

Data dari DaftarSekolah.net, (2025) ini penting sebagai gambaran mengenai bagaimana kondisi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih banyak SLB yang belum terstandarisasi dan belum terakreditasi, dengan artian bahwa pentingnya perhatian lebih dari pemerintah terhadap pengawasan mutu pendidikan dan pemberdayaan terhadap SLB. Meskipun telah banyak kebijakan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas, fakta di lapangan membuktikan bahwa adanya perbedaan akses yang mencolok. Studi terhadap pendidikan inklusif di Indonesia menjelaskan bahwa masih banyak hambatan pada pelaksanaan prinsip kesetaraan, oleh karena itu anak penyandang disabilitas sulit mendapatkan kesempatan belajar yang setara layaknya anak normal lainnya Mustopa et al (2025).

Selain dari pada itu, berdasarkan pada laporan UNICEF mempertegas bahwa anak penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami hambatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, gizi, dan sanitasi, yang membuktikan bahwa terdapat kesenjangan sosial yang sistematis UNICEF, (2023). Hal ini diperburuk oleh pola layanan yang fokusnya masih pada aspek belas kasihan dan bukan pemberdayaan, yang menimbulkan anak disabilitas tetap bergantung tanpa diberi kesempatan untuk mengambil peran aktif terhadap hidup mereka. Pernyataan ini searah dengan pendapat Supriyanto et al., (2025) yang mengungkapkan dalam jurnal penelitiannya bahwa pemberian bantuan berupa alat, dukungan dasar, dan tidak hadirnya usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian para penyandang disabilitas, memunculkan pola ketergantungan yang kuat. Maka dari itu, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah untuk menambah literatur yang meninjau langsung

bagaimana bentuk pemberdayaan dilakukan secara struktural melalui program rehabilitasi sosial, terutama di asrama SLB yang berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial DIY.

Penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai penyandang disabilitas melalui akses pendidikan dan perilaku sosial, tetapi mengenai pemberdayaan anak disabilitas dalam lingkungan pemerintahan, terutama yang tinggal di asrama SLB milik negara masih sedikit yang menyoroti. Dalam penelitian Surwanti & Puspitosari, (2019) menekankan pentingnya pemberdayaan yang berbasis komunitas dan keluarga. Maka dengan demikian, penelitian ini penting secara ilmiah untuk menambah literatur yang membahas secara langsung bagaimana bentuk pemberdayaan dilaksanakan secara sistematis melalui program rehabilitasi sosial, terutama di asrama SLB yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Sosial DIY.

Berdasarkan mengenai uraian kondisi di atas, bisa dilihat bahwa pada upaya pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Negeri Kulonprogo melalui program rehabilitasi sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial DIY menjadi bagian penting untuk dikaji secara lebih dalam. Penelitian ini tidak dimulai dari pertanyaan mengenai seberapa jauh peran Dinas Sosial, melainkan berfokus pada identifikasi berbagai aktivitas yang dilaksanakan, proses perancangan, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut bisa terlaksana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, berikut rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis:

1. Apa saja bentuk aktivitas dan proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberdayakan anak penyandang disabilitas di Asrama Sekolah Luar biasa (SLB) Negeri Kulonprogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk

1. Memberikan deskripsi mengenai kegiatan dan proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam memberdayakan anak penyandang disabilitas di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kulonprogo.

D. Kajian Pustaka

Penelitian pertama, penelitian yang bersumber dari Putri Aliyah & Amta Dimas (2024) yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Melalui Program Rehabilitasi Sosial di Panti Fajar Harapan” yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Melalui Program Rehabilitasi Sosial di Panti Fajar Harapan” termasuk dalam bagian rujukan penting dalam memahami proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui intervensi lembaga sosial. Subjek penelitian ini yaitu penyandang disabilitas netra dan fisik penghuni Panti Sosial Fajar Harapan. Fokus pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial, yang mencakup kegiatan pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, dan penguatan kapasitas individu dalam mencapai kemandirian. Penelitian ini menyoroti unsur-unsur penting pemberdayaan seperti pengembangan potensi diri, pelatihan vokasional, akses terhadap informasi serta pendampingan tenaga sosial. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Merujuk pada hasil yang diperoleh melalui analisis data ditemukannya bahwa peneliti menjelaskan keberhasilan program rehabilitasi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: konsistensi pelaksanaan program, keterlibatan aktif penerima manfaat, dan dukungan lingkungan sosial.

Persamaan yang terkait dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis antara lain sama-sama membahas mengenai pelaksanaan terhadap program rehabilitasi sosial dalam institusi penyedia layanan bagi penyandang disabilitas, memakai metode kualitatif deskriptif, dan upaya dalam memaknai bagaimana program tersebut mampu mengembangkan kemandirian dan kualitas hidup dari individu disabilitas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu lebih menyoroti pemberdayaan anak disabilitas di lingkungan pendidikan asrama yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, sedangkan penelitian ini mengeksplorasi lebih dalam bentuk dan proses pemberdayaan bagi anak-anak usia muda dengan kebutuhan khusus, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.

Penelitian kedua, penelitian yang bersumber dari skripsi Alvian Dwivan, (2021) yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Di Kota Magelang” membahas lebih dalam mengenai peran dari lembaga pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam usaha memberdayakan kelompok penyandang disabilitas. Subjek pada penelitian skripsi ini berfokus terhadap kebijakan dan praktik pemberdayaan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial setempat. Unsur yang menjadi sorotan dalam penelitian ini mencakup mengenai perencanaan program, bentuk intervensi sosial, pendampingan, dan keberlangsungan program pemberdayaan yang dikhususkan terhadap penyandang disabilitas baik secara mental, maupun sosial. Terdapat temuan pada penelitian terdahulu yaitu, Dinas Sosial Kota Magelang melaksanakan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberian alat bantu disabilitas, serta bimbingan sosial untuk meningkatkan kemandirian. Disisi lain, ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan program kerja, yaitu meliputi anggaran yang terbatas, kekurangan tenaga pendamping profesional, dan masih sedikitnya keluarga dan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Persamaan yang terkait dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis antara lain keduanya sama-sama menyoroti lembaga Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui program rehabilitasi sosial, dan pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat keberadaan sosial dan kemandirian para penyandang disabilitas. Keduanya juga memakai metode kualitatif deskriptif dengan pemakaian teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada fokus kajian pada peneliti terdahulu dilakukan di Magelang dan tidak membahas anak-anak penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan seperti asrama SLB, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan program rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial DIY terhadap para anak penyandang disabilitas, dan juga fokus kepada lembaga sosial dan pendidikan dalam upaya pemberdayaan anak penyandang disabilitas.

Penelitian ketiga, penelitian sebelumnya bersumber dari Riza Korin & Indarto, (2024) yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda” membahas mengenai pelaksanaan program

rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan, kebijakan, efektivitas, hambatan, dan faktor program pendukung rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

Persamaan yang terkait dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis antara lain sama-sama berfokus pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagai sarana pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan Dinas Sosial sebagai aktor utama. Keduanya juga menekankan tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Namun perbedaannya ada pada subjek dan konteks meneliti mengenai penyandang disabilitas secara umum di Kota Samarinda, dengan berfokus pada alat bantu dan pelatihan keterampilan, sementara penelitian ini berfokus pada anak-anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Kulonprogo, dengan perhatian khusus pada penerapan program rehabilitasi sosial dalam lingkungan pendidikan asrama.

Penelitian keempat, penelitian ini bersumber dari Nurliana, (2022) berjudul “Program Layanan Sosial Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Di SLB-B YPAC Kota Banda Aceh” membahas mengenai layanan sosial yang diberikan untuk anak-anak tunarungu di SLB-B YPAC Banda Aceh. Fokus penelitian terdahulu ini mencakup pelatihan keterampilan seperti menjahit dan merangkai bunga, pembinaan keagamaan, serta dukungan moral dan psikososial. Layanan tersebut difokuskan terhadap peserta didik dengan tujuan untuk menampukkan mereka pada saat menyesuaikan diri dalam lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk menilai efektivitas program layanan sosial tersebut.

Penelitian Nurliana, (2022) ini mempunyai kesamaan karena membahas mengenai anak-anak berkebutuhan khusus dilingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan meneliti program rehabilitasi sosial. Namun, ada perbedaan antara penelitian Nurliana dengan penulis yaitu, dalam penelitian Nurliana lebih fokus terhadap anak tunarungu dan program yang dijalankan langsung oleh SLB. Sementara itu, penelitian ini membahas mengenai anak-anak penyandang disabilitas secara umum

yang tinggal di Asrama SLB Kulonprogo, dan secara khusus menyoroti program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan

Dalam kamus bahasa Indonesia pemberdayaan ini merupakan kata dasar dari “daya” yang dimaknai dengan “kekuatan”. Dalam bahasa Inggris pengucapannya pemberdayaan yakni “*empowerment*”. Konsep mengenai pemberdayaan ini menghasilkan kekuatan terhadap kelompok yang dianggap lemah dan kurang mampu dalam ikut berpartisipasi dalam kehidupan yang mandiri, terlebih lagi dalam memenuhi kebutuhan utama hidupnya sehari-hari.

Dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi* Alim Wahab et al., (2022) pemberdayaan adalah pendekatan dalam pembangunan sosial yang memosisikan masyarakat menjadi subjek utama. Pemberdayaan dideskripsikan sebagai suatu proses dalam meningkatkan kemauan, kesadaran, dan juga kemampuan individu dan kelompok dengan harapan mereka memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengatasi masalah hidup mereka dengan cara yang mandiri. Dalam konteks kelompok rentan pemberdayaan harus bersifat menyeluruh dan memperhatikan prinsip keadilan sosial, tanpa melihat kondisi fisiknya, mereka mempunyai hak yang sama dalam berkembang dilingkungan masyarakat. Maka dengan itu pada program pemberdayaan penting untuk menghindari dari praktik diskriminasi membentuk lingkungan sosial yang memberikan dukungan.

Pada konsep pemberdayaan menurut, Bhari, (2019) masyarakat mulai mengalami perkembangan yang dinamis searah dengan berubahnya kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam konsep ini menawarkan kerangka pemberdayaan berkelanjutan yang fokusnya pada tiga komponen pokok, yaitu input, proses dan output:

a. Komponen Input

Pada komponen ini, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan memfokuskan pada empat aspek kategori sumber daya, yaitu:

- Sumber daya individu, yang mencakup kapasitas, kompetensi, dan potensi pribadi individu yang menjadi subjek pemberdayaan.
- Sumber daya keluarga, meliputi dukungan finansial, emosional, dan sosial yang asalnya dari lingkungan keluarga dekat.

- Sumber daya kelompok, mencakup bantuan, modal sosial dan jejaring yang dimiliki komunitas masyarakat tertentu.
- Sumber daya kelembagaan, yaitu dorongan terhadap fasilitas, kebijakan, dan infrastruktur dari lembaga formal maupun informal.

b. Komponen proses

Bahri memperjelas bahwa keberlangsungan pemberdayaan dilihat pada jalan serangkaian aktivitas yang saling terhubung, meliputi:

- Perubahan sikap, usaha membentuk pola pikir dan nilai positif yang mendukung partisipasi.
- Peningkatan pengetahuan melalui jalur pendidikan, pelatihan, edukasi, dan penyebaran informasi yang relevan.
- Pengelolaan sumber daya, yaitu kemahiran dalam merancang, memakai, dan melindungi sumber daya yang ada secara tepat guna.

c. Komponen output

Pencapaian akhir yang diharapkan melalui pemberdayaan berkelanjutan ini yaitu :

- Individu yang mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Keluarga yang berfungsi menjadi unit pendukung bagi anggotanya.
- Kelompok masyarakat yang solid dengan modal sosial yang kuat.
- Lembaga yang bisa meneruskan dan meningkatkan usaha pemberdayaan tersebut secara mandiri.

Dengan begitu konsep pemberdayaan yang diusulkan oleh Bhari bukan hanya mengarah pada kebutuhan jangka pendek saja akan tetapi, membangun dasar yang kokoh dengan tujuan untuk memperoleh proses dan hasil pemberdayaan dapat berlangsung lebih tumbuh dengan baik dan menghasilkan manfaat dalam jangka waktu panjang terhadap seluruh masyarakat.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai apa saja aktivitas yang dilakukan dan bagaimana proses pelaksanaan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan. Maka dengan itu penelitian ini tidak memfokuskan terhadap pengukuran hasil akhir atau capaian program secara kuantitatif ataupun evaluatif. Oleh karena itu komponen pada output tidak masuk dalam kerangka konsep. Penulis lebih memilih pada dinamika proses dan bentuk sebagai fokusnya dalam aktivitas yang dilakukan terhadap aktor-

aktor mengenai pemberdayaan, dengan alasan pada kedua aspek tersebut yang dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan terhadap penelitian lebih mendalam dan konseptual. Pada konsep ini juga searah dengan orientasi kualitatif yang lebih menekankan terhadap pemahaman proses sosial dari pada pengukuran capaian numerik.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial secara umum dalam kamus besar bahasa Indonesia Rehabilitasi didefinisikan sebagai usaha dalam mengembalikan seseorang dalam kondisi atau posisi semula. Dengan begitu, rehabilitasi merupakan metode sebagai pemulihan keadaan penyandang disabilitas melalui intervensi fisik, sosial maupun psikologis dengan tujuan mereka mampu mengoptimalkan kemampuan dirinya. Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 serta UU No. 11/2009, rehabilitasi sosial dideskripsikan sebagai “tahapan refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang bisa melakukan fungsi sosialnya dengan normal dalam kehidupan masyarakat”. Rehabilitasi diambil dari dua kata, yaitu “re” yang memiliki makna “kembali” dan rehabilitasi” yang berarti “kemampuan”, dengan itu makna rehabilitasi secara harfiah berarti “Mengembalikan kemampuan”

Peraturan-peraturan ini menugaskan Dinas Sosial DIY untuk mengadakan program Rehabilitasi Sosial terpadu melalui Balai Rehabilitasi terpadu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan difabel. Program dari Rehabilitasi Sosial terpadu terdiri dari tiga komponen utama Dinas Sosial DIY, (2025). Yaitu sebagai berikut:

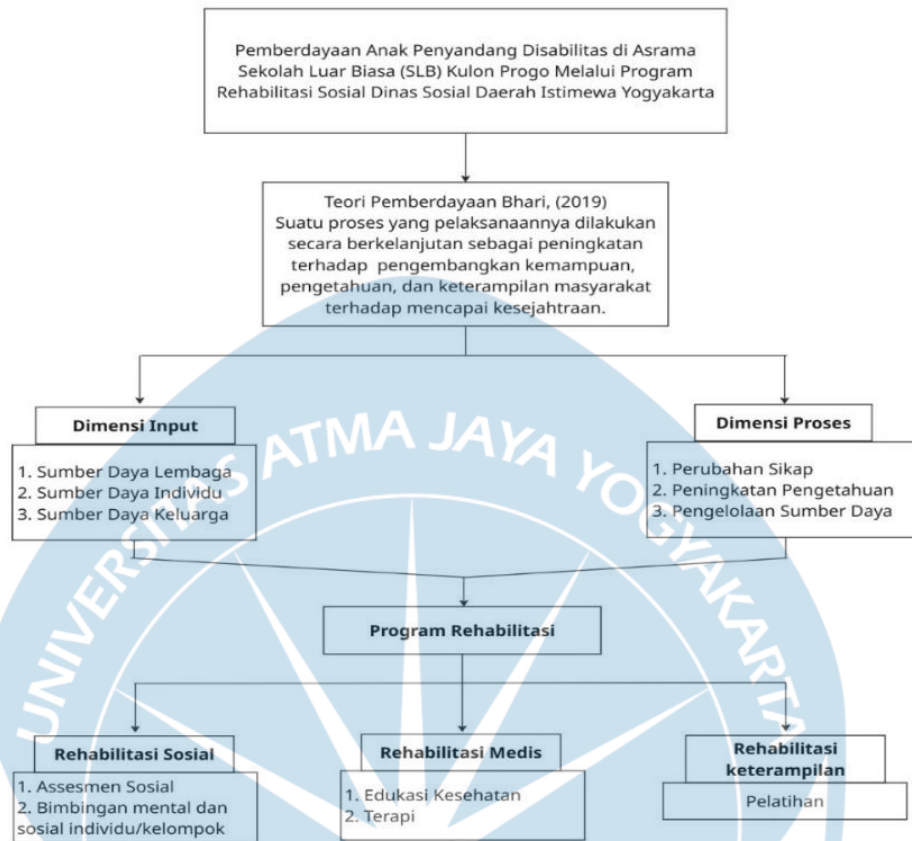
- Pertama, rehabilitasi sosial, yaitu proses dari refungsional dan pengembangan yang memiliki tujuan daman memulihkan kembali fungsi sosial individu pada penyandang disabilitas dengan itu mereka diharapkan mampu melaksanakan peran sosialnya dengan normal. Hal ini disajikan dalam UU No. 11/2009 mengenai kesejahteraan sosial yang mendeskripsikan bahwa rehilitasi sosial melingkupi asesmen sosial, bimbingan mental, dan bimbingan sosial yang dilakukan secara individu (misalnya pendampingan dalam kegiatan sehari-hari dan penyesuaian perilaku) maupun secara kelompok (bimbingan dalam bentuk rohani, olahraga, kedisiplinan). Dalam proses ini bersifat holistik karena bukan hanya fokus terhadap aspek fisik saja namun juga psikis dan sosial bagi penyandang disabilitas

dengan begitu mereka diharapkan dapat hidup mandiri dan berdaya dalam lingkungan masyarakat.

- Kedua, rehabilitasi medis, merupakan bagian dari layanan pemulihan yang fokusnya terhadap aspek kesehatan fisik dan fungsional individu. Kegiatan ini meliputi pelayanan edukasi kesehatan, pemeriksaan berkala dan deteksi dini), perawatan dan rawat jalan, fisioterapi, okupasi therapy, hydrotherapy) sebagai pemulihan fungsi fisik dan kualitas hidup. Tujuan utama dari rehabilitasi medis yaitu sebagai menaikkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi tubuh bagi yang mengalami gangguan dengan begitu penyandang disabilitas bisa kembali beraktivitas dengan optimal dalam kehidupan sehari-hari.
- Ketiga merupakan salah satu bentuk campur tangan pemberdayaan yang arahnya sebagai peningkatan taraf kapasitas ekonomi dan kemandirian sosial bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini meliputi pelatihan keterampilan mengenai desain grafis, menjahit, komputer, elektronik, message. Bimbingan ini bukan hanya sebagai peningkatan keterampilan praktis, namun juga sebagai pendukung dalam kepercayaan diri dan persiapan terhadap penyandang disabilitas pada saat memasuki dunia kerja ataupun dalam membuka usaha mandiri. Program tersebut masuk dalam bagian penting yang ada dalam strategi rehabilitasi sosial karena memastikan keberlangsungan hidup dan partisipasi aktif individu dalam lingkungan masyarakat.

A. Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1 : Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Kerangka berpikir pada penelitian ini disusun sebagai gambaran untuk melihat hubungan antara konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Bhari, (2019) dengan pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Asrama SLB Kulon Progo. Berdasarkan dari teori tersebut, pemberdayaan memiliki tiga dimensi utama yaitu, input, proses, output, namun penulis hanya memakai dua dimensi yaitu input dan proses.

Pada dimensi input, sumber daya menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan terhadap program pemberdayaan. Sumber daya ini meliputi sumber daya lembaga, sumber daya individu, dan sumber daya keluarga. Sumber daya lembaga meliputi dukungan dari Dinas Sosial, pihak Asrama SLB Kulon Progo. Sumber daya individu merujuk pada anak penyandang disabilitas sebagai subjek pemberdayaan yang berpotensi untuk berkembang. Lain dari itu sumber daya keluarga mempunyai tugas penting dalam mendukung

Melalui kerangka berpikir ini, peneliti dapat memahami keterkaitan antara input, proses, dan hasil dalam pemberdayaan anak penyandang disabilitas dengan tetap memerhatikan aspek rehabilitasi sosial, medis, dan keterampilan sebagai pilar utama yang mendukung pencapaian tujuan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial DIY.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini mempunyai empat bab yaitu:

- BAB I** : Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, masalah yang dikaji, tujuan penelitian, landasan teori yang digunakan. Alur berpikir penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pada Bab ini membahas mengenai cara penelitian dilakukan, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, gambaran lokasi penelitian dan, profil mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam program rehabilitasi sosial di asrama SLB N Kulon Progo.
- BAB III** : Memaparkan hasil temuan di lapangan dan membahas proses pemberdayaan anak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY melalui rehabilitasi sosial
- BAB IV** : Bab ini berisi rangkuman hasil dari penelitian sekaligus jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan.